

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

RAKHA MITA ARTANTI

NIM 4320034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

RAKHA MITA ARTANTI

NIM 4320034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rakha Mita Artanti

NIM : 4320034

Judul Skripsi : **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya peneliti, kecuali dalam bentuk kutipan yang peneliti sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,



Rakha Mita Artanti

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rakha Mita Artanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **Rakha Mita Artanti**
NIM : **4320034**
Judul Skripsi : **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 16 Juli 2024
Dosen Pembimbing,



Happy Sista Devy, M.M
NIP. 199310142018012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www.febi.uingusdur.ac.id | email : febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **RAKHA MITA ARTANTI**
NIM : **4320034**
Judul : **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Dewan Penguji,

Penguji I

Muhammad Nasrullah, M.S.I
NIP. 198011282006041003

Penguji II

Ardiyan Darutuma, M.Phil
NIP. 198501262020121004

Pekalongan, 24 Juli 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

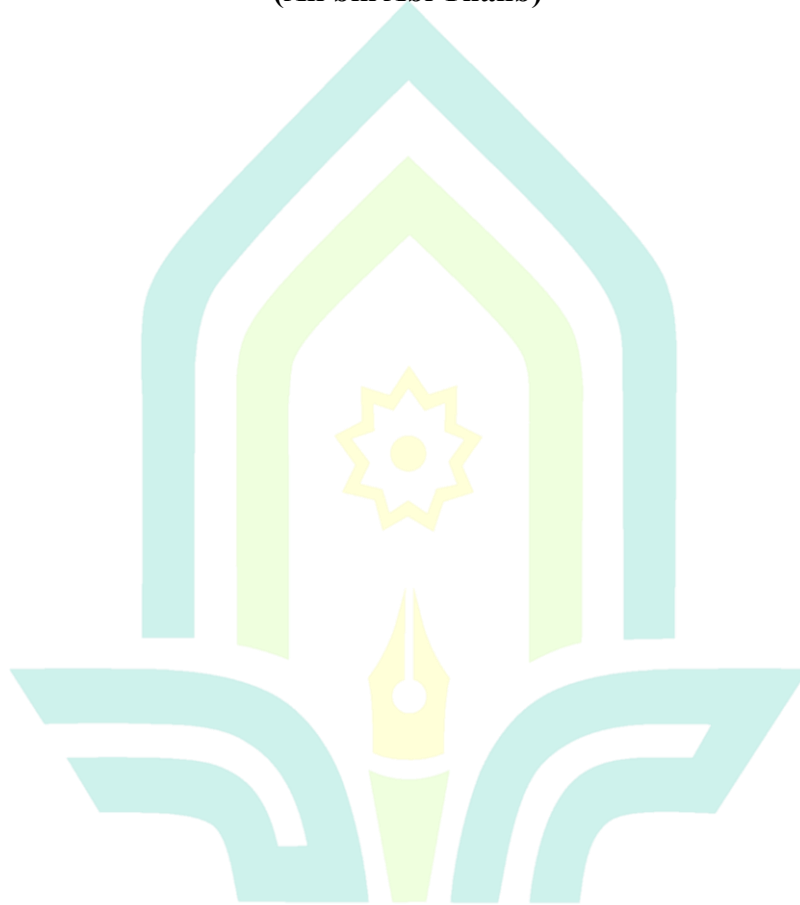
MOTTO

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak”

(Napoleon Hill)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Ruba'i dan Ibu Kunami yang selalu memberikan kasih sayang dan tidak pernah putus mendoakan serta selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk adik saya, yang telah memberi dukungan dan hiburan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan warna dalam hidup saya dan memberikan semangat serta motivasi kepada saya.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Happy Sista Devy, M.M yang selalu membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga terselesaikan.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ade Gunawan, M.M yang telah memberikan bimbingan dalam masa perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah 2020 yang telah menemani selama masa perkuliahan.
7. Diri saya sendiri, terima kasih telah berusaha, berjuang, dan bertahan sampai detik ini.

ABSTRAK

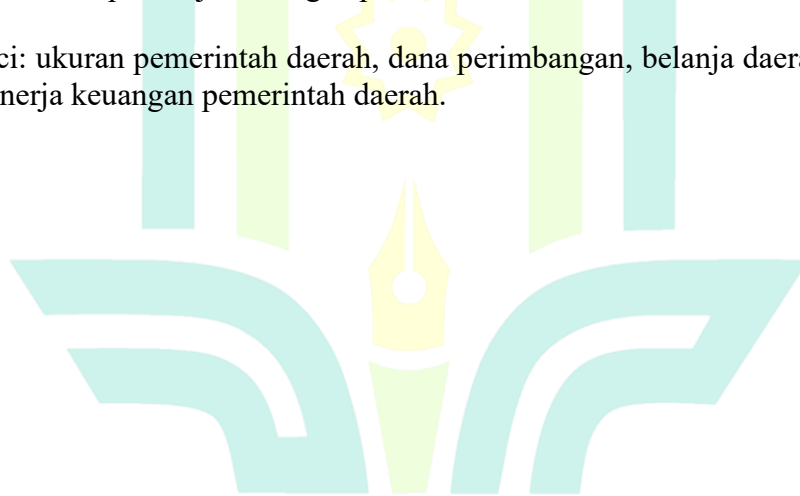
RAKHA MITA ARTANTI. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah memperlihatkan seberapa baik pemerintahan mengurus finansial guna menjalankan rencana kebijakan sehingga berhasil memperoleh tujuan, visi, misi dan sasaran pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk menentukan kapasitas daerah untuk menerapkan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 64 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan Eviews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja daerah, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah.



ABSTRACT

RAKHA MITA ARTANTI. *The Influence Of Regional Government Size, Balancing Funds, Regional Expenditures And Capital Expenditures On Regional Government Financial Performance.*

Regional government financial performance shows how well the government manages finances to carry out policy plans so that it succeeds in achieving the goals, vision, mission and targets of regional government. Financial performance measurements can be used to determine regional capacity to implement regional autonomy. This research aims to examine the influence of regional government size, balancing funds, regional expenditure and capital expenditure on regional government financial performance.

This research is quantitative research. The population in this research is the Regency/City Regional Government Financial Reports in East Java Province for 2021-2022. The sampling technique used was purposive sampling technique, obtaining 64 samples. This research uses multiple linear regression analysis methods with the help of Eviews 12.

The research result show that regional government size and capital expenditure do not have a significant effect on regional government financial performance. Meanwhile, balancing funds and regional spending have a significant negative effect on regional government financial performance.

Key words: regional government size, balancing funds, regional expenditure, capital expenditure, regional government financial performance.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

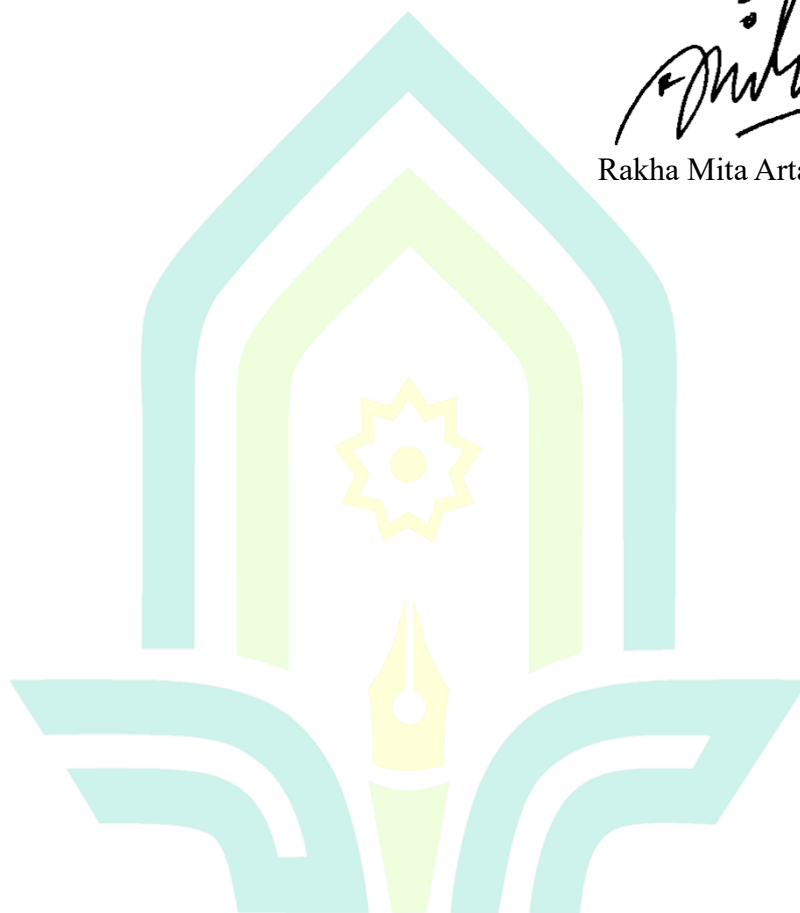
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Happy Sista Devy, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Segenap Dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staff.
7. Kedua orang tua dan sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 Juli 2024



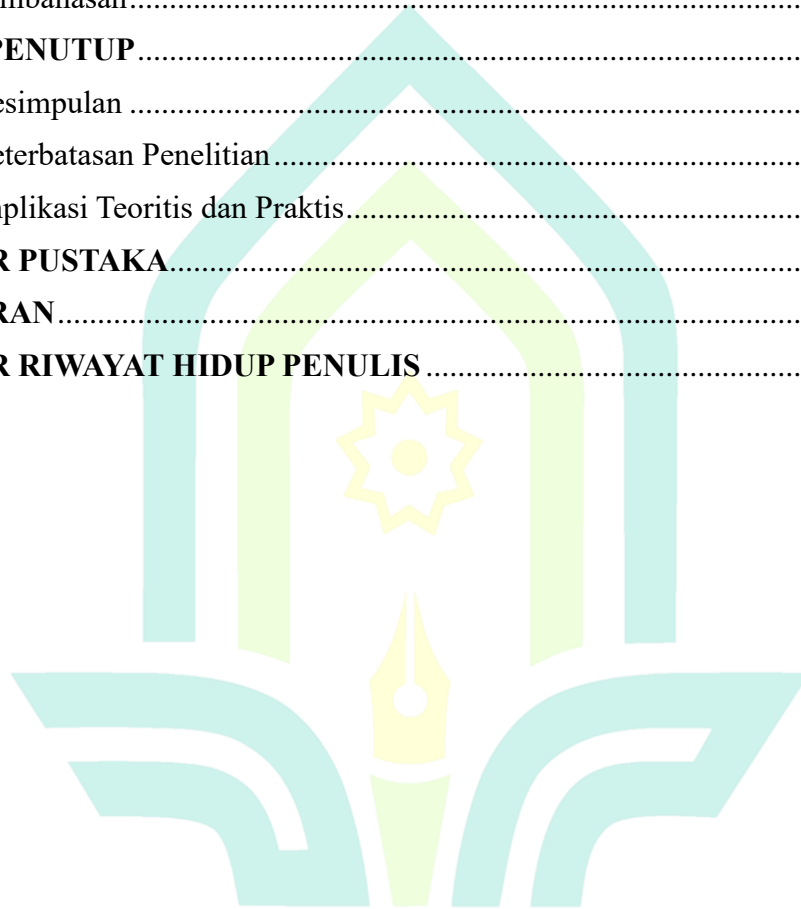
Rakha Mita Artanti



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
B. Telaah Pustaka.....	27
C. Kerangka Berpikir	33
D. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Setting Penelitian	40
D. Populasi dan Sampling.....	40
E. Variabel Penelitian	41

F. Definisi Operasional.....	41
G. Sumber Data.....	44
H. Teknik Pengumpulan Data	44
I. Metode Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Analisis Data	52
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian.....	77
C. Implikasi Teoritis dan Praktis.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa'ala
- ذُكِرَ - zukira
- يَذْهَبُ - yazhabu
- سُئِلَ - su'ila
- كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ىِ ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ىِ ...	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

	-- raudatulafāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- Ina
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistaṭā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا Inna awwala baitin wuḍi’a linnās il

allażi bibakkat amubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-

Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fihil

Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubīn

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

Alhamdulillahirabbilil ‘ālamīn

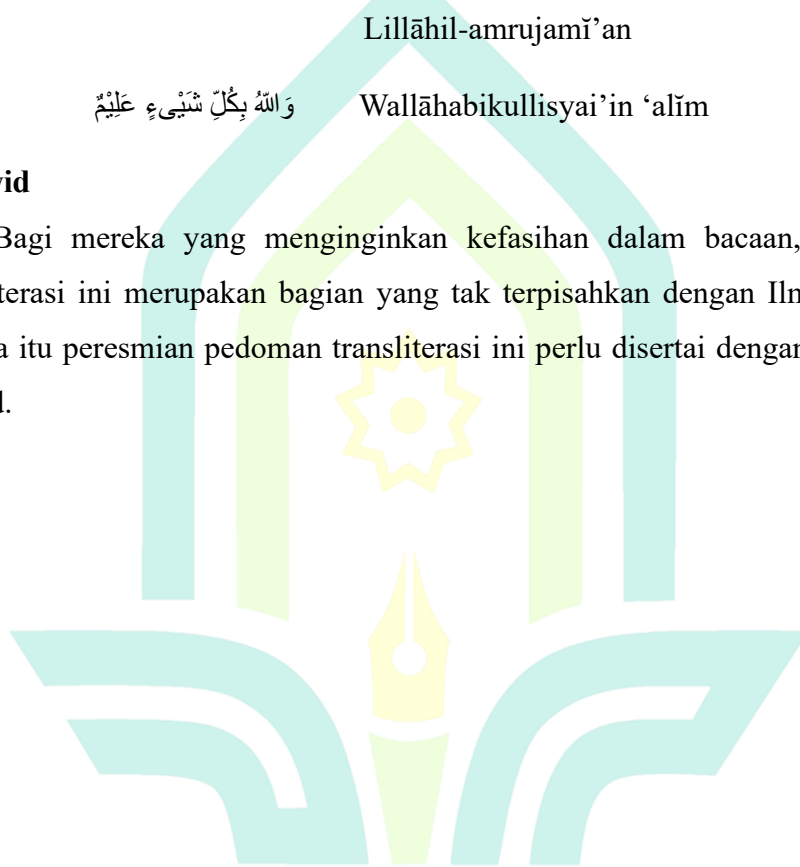
Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrunminallāhiwafathunqarīb
لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amrujamī’an
	Lillāhil-amrujamī’an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhabikullisyai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

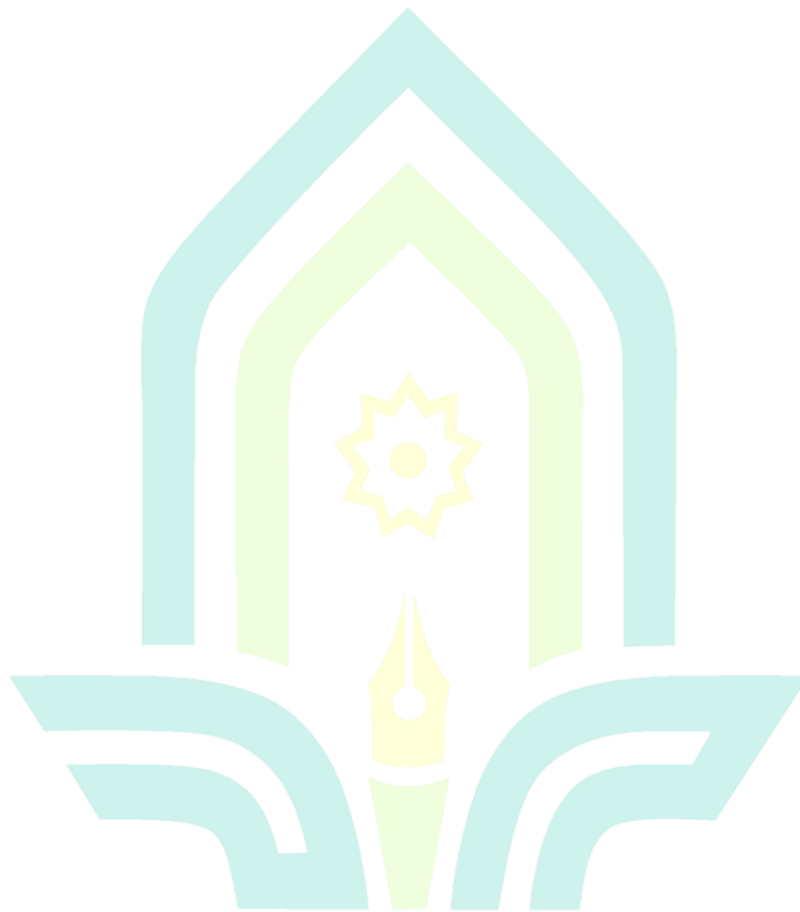


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Efektivitas	16
Tabel 2.2 Telaah Pustaka	27
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	41
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	55
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Random Effect Model.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Chow</i>	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas <i>Glejser</i>	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	65
Tabel 4.14 Hasil Uji t	66

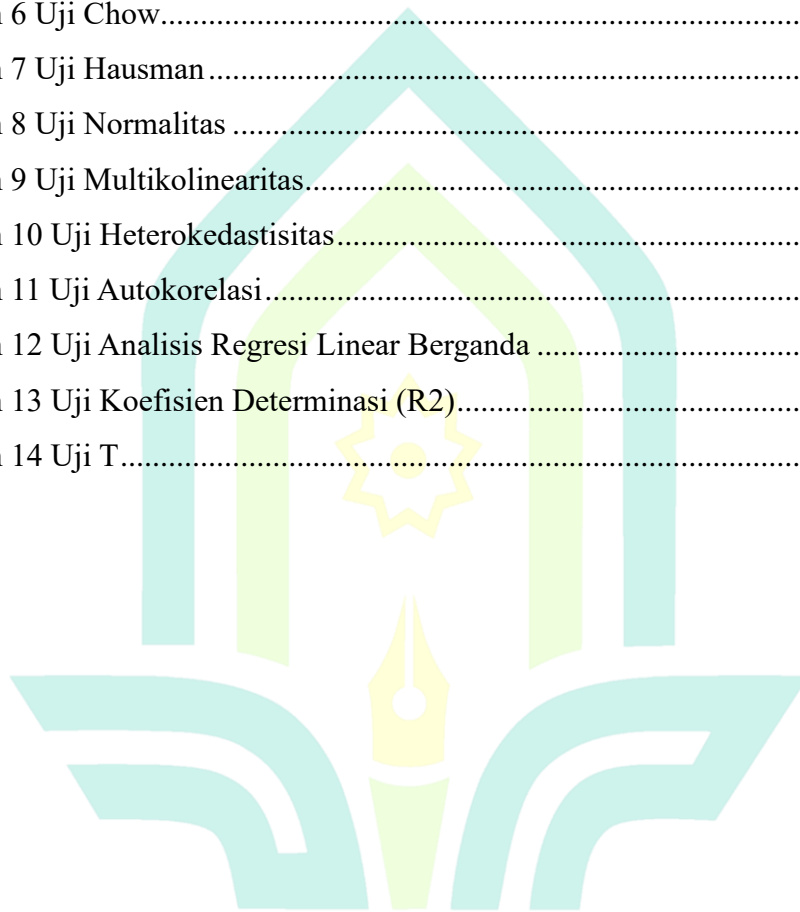
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Penelitian	I
Lampiran 2 Hasil Uji statistik Deskriptif.....	XVI
Lampiran 3 Uji Common Effect Model	XVI
Lampiran 4 Uji Fixed Effect Model.....	XVII
Lampiran 5 Uji Random Effect Model	XVII
Lampiran 6 Uji Chow.....	XVIII
Lampiran 7 Uji Hausman	XVIII
Lampiran 8 Uji Normalitas	XVIII
Lampiran 9 Uji Multikolinearitas.....	XVIII
Lampiran 10 Uji Heterokedastisitas.....	XIX
Lampiran 11 Uji Autokorelasi.....	XIX
Lampiran 12 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	XIX
Lampiran 13 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	XIX
Lampiran 14 Uji T.....	XIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan banyaknya provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Kini pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan pengelolaan keuangan yang sudah melalui perkembangan dari tahun 2000. Undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 menyatakan, otonomi daerah yaitu kebebasan, kekuasaan, dan tanggung jawab yang dipunyai daerah otonom guna mengelola dan menangani urusan pemerintah daerah itu sendiri serta keperluan masyarakat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan dasar otonomi dan tugas pembantuannya sesuai undang-undang, pemerintah daerah diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat guna mengelola dan menangani urusan pemerintahan daerah itu sendiri, terutama pengelolaan keuangan. Dalam perundang-undangan otonomi daerah berisikan mengenai kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan secara lebih luas, jelas, dan akuntabel (Nurhayati & Hamzah, 2020).

Untuk mencapai tujuan entitas, pemerintah daerah membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Komponen keuangan harus dikelola dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas publik termasuk memberi informasi mengenai kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah disampaikan untuk seseorang yang memiliki kepentingan (Dewanti et al., 2022).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dicatat, diukur, dan dinilai untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Jika pemerintah daerah mengendalikan kinerja keuangan secara tepat dan baik, pengelolaan keuangan akan menjadi lebih baik termasuk dalam mengelola belanja modal (Niswani et al., 2022). Untuk memastikan bahwa keuangan pemerintah daerah dikelola dengan baik, analisis dan evaluasi kinerja keuangan diperlukan. Ini dapat dicapai dengan melakukan analisis tentang hal-hal yang mungkin menghambat pengoptimalan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi pengelola keuangan daerah lebih banyak informasi tentang cara meningkatkan kualitas keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya, terutama keuangan. Untuk mengukur kinerja, dapat membandingkan capaian suatu laporan keuangan dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan dan pelayanan sosial (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah beroperasi dengan efektif (Lestari Endri, 2020). Rasio efektivitas menunjukkan seberapa sukses pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang telah

ditentukan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin mampu pemerintah daerah mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah (Puspita, 2018).

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada 26 Desember 2022, realisasi belanja APBD tahun 2022 baru mencapai 78,29%, lebih rendah daripada serapan APBN nasional yang mencapai 91,02%. Bahkan serapan anggaran di Kemendagri sudah mencapai 98%. Di tingkat provinsi, realisasi belanja paling rendah yaitu Sulawesi Tengah 66,25%. Di tingkat kabupaten dan kota, realisasi belanja APBD paling rendah yaitu di Kepulauan Selayar 58,49%, Tembrauw 59,25%, dan Bondowoso 59,55%. Realisasi belanja rendah pada tingkat kota terjadi di Kota Makassar 50,23%. Menurut catatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, masih ada dana yang mengendap di tingkat provinsi sebesar Rp 66,43 triliun, di tingkat kabupaten sebesar Rp 122,49 triliun dan di tingkat kota sebesar Rp 30,17 triliun. Rendahnya realisasi APBD dikarenakan kelambanan daerah untuk memastikan perencanaan bisa dilaksanakan tepat waktu, seperti adanya kerumitan administrasi pencairan dana dari Kemenkeu dan kurangnya koordinasi antar satuan perangkat daerah (Purnamasari, 2022). Karena serapan anggaran yang rendah, pemerintah harus lebih memperhatikan kinerja keuangan daerah.

Putra (2022) menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain yaitu belanja pemerintah, *independent financing*, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rasio pajak, rasio retribusi, ukuran pemerintah daerah, dan Sisa Lebih Penggunaan

Anggaran (SILPA) (Putra, 2022). Dari beberapa faktor diatas mungkin terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aset pemerintah daerah menyatakan seberapa besar atau kecilnya ukuran pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah bisa mengelola semua potensinya dan memanfaatkan sumber daya keuangannya dengan benar, pendapatan daerah dapat meningkat secara tidak langsung. Menurut Aulia (2020), secara signifikan ukuran pemerintah daerah memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan, karena dilihat dari jumlah besarnya aset pemerintah daerah tersebut. Ketika ukuran pemerintah daerah meningkat, maka kegiatan operasional menjadi lebih lancar dalam hal memberi layanan untuk masyarakat karena pemerintah daerah lebih dituntut untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (Aulia & Rahmawaty, 2020). Meningkatnya total aset pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan secara efektif.

Dana perimbangan digunakan dalam meminimalkan perbedaan pembiayaan antar daerah. Dana perimbangan ialah transfer pendapatan yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna menganggarkan aktivitas operasional pemerintah daerah (Damar et al., 2020). Dengan peningkatan jumlah dana perimbangan yang diserahkan untuk

pemerintah daerah, maka menjadikan bertambahnya dana yang bisa dimanfaatkan guna memperbaiki kegiatan dan program pemerintah daerah. Penggunaan dana perimbangan ini diawasi pemerintah pusat dan pemerintah pusat harus melakukan lebih banyak pengawasan apabila pemerintah daerah menerima dana perimbangan yang besar. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah teliti untuk menerapkan rencana kerjanya (Damar et al., 2020). Menurut Putri (2023) dalam desentralisasi, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan. Salah satu peran pemerintah pusat adalah melalui dana perimbangan yang berkontribusi pada APBD. Meningkatkan anggaran belanja daerah yang besar adalah upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Menurut pernyataan tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah masih jauh dari optimal. Akibatnya, pemerintah daerah harus menghadapi konsekuensi logis dari hal ini, yaitu memiliki penilaian yang lebih buruk tentang kinerja keuangan daerah tersebut (Ni Putu Ayu Septiyani Putri & Gede Adi Yuniarta, 2023).

Peraturan Pemerintahan RI No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa “belanja daerah yaitu antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga serta belanja transfer.” Belanja pemerintah dapat menjamin stabilitas ekonomi, dan belanja daerah memiliki kaitan yang mencakup kualitas layanan publik. Selain itu, kegiatan belanja daerah berkontribusi terhadap penciptaan sumber pendapatan dari potensi daerah (Angraini & Hidayat, 2023).

Belanja daerah dialokasikan guna membangun gedung aset daerah dianggap sebagai belanja modal, menurut Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006. Kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dengan peningkatan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melaksanakan rotasi belanja, yang berarti menaikkan alokasi belanja modal, untuk menaikkan keyakinan masyarakat dan hasil kerja daerah (Bilqis & Priyono, 2023). Tingginya belanja modal memperlihatkan banyak infrastruktur dan fasilitas yang sedang dibangun. Jika keuangan daerah juga berfungsi dengan baik, hal ini akan berhasil. Jika pembangunan yang dilakukan semakin banyak, maka artinya kinerja keuangan daerah juga semakin baik (Niswani et al., 2022).

Realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur dalam APBD konsolidasi Triwulan I-2021 mencapai Rp 10,68 triliun. Realisasi tersebut turun secara nominal dan persentase dibandingkan realisasi pada Triwulan I-2019 sebesar Rp 12,37 triliun dan 2020 sebesar Rp 12,53 triliun. Realisasi belanja Daerah mengalami penurunan sebesar 14,78% dibandingkan dengan Triwulan I-2020. Sebagian besar kategori belanja Daerah mengalami pertumbuhan negatif. Proporsi Belanja Daerah yang meningkat pada alokasi pagu Triwulan I-2021 dibandingkan alokasi pagu Triwulan I-2020 yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan proporsi belanja daerah yang menurun pada alokasi pagu Triwulan I-2021 dibandingkan alokasi pagu Triwulan I-2020 yaitu belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi dan belanja hibah (Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, 2021).

Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, total seluruh pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2022 yaitu Rp 120,4 triliun. Dengan realisasi pendapatan per 2 November 2022 adalah Rp 90,8 triliun atau 75,41%. Realisasi belanja sebesar Rp 79,2 triliun dari rencana belanja yaitu Rp 132,9 triliun atau 59,62%. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, rata-rata masih memiliki realisasi belanja yang rendah. Kabupaten Bondowoso memiliki persentase realisasi belanja terendah yaitu 43,93%. Disusul Kabupaten Jombang yang memiliki persentase realisasi belanja 46,48%. Kabupaten Ponorogo berada di posisi ketiga dengan persentase realisasi belanja 48,41%. Realisasi belanja rendah dikarenakan masih adanya dana yang belum dibelanjakan di beberapa kabupaten (Syafik, 2022). Rendahnya persentase realisasi belanja pada Kabupaten/kota di Jawa Timur menjadikan pemerintah harus mengevaluasi terhadap pencairan anggaran dari program dan kegiatan yang sudah ditetapkan APBD.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus segera menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan daerah, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dimana telah diperiksa oleh BPK. Salah satu masalah tersebut adalah bahwa pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan yang dilakukan pada 8 (delapan) SKPD tidak memenuhi persyaratan. Karena volume pembayaran yang kurang dan kesalahan perhitungan saat pemungutan pembayaran, serta terdapat pendapatan belum diterima kas daerah dan kelebihan pembayaran. Selain itu, BPK menemukan bahwa ada pengendalian yang salah atas belanja hibah uang pada Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) yang menyebabkan kelebihan pembayaran, hal ini membuat pemerintah provinsi Jawa Timur harus memperbaiki tanggung jawab pelaksanaan APBD (BPK, 2023).

Berdasarkan penelitian Nurhayati dan Hamzah (2020) memperoleh hasil ukuran pemerintah daerah ada pengaruh simultan dan signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah, namun riset lain dari Dewanti, Masbila dan Aprianti (2022) menunjukkan hasil ukuran pemerintah daerah tak memberikan pengaruh signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada riset Dasmal, Basri, Indrawati (2020) diperoleh bahwa dana perimbangan ada pengaruh positif kepada kinerja pemerintah, akan tetapi riset Niswani dan Ikhyanuddin (2022) memperoleh hasil dana perimbangan tidak ada pengaruh signifikan kepada kinerja keuangan daerah. Penelitian Angraini dan Hidayat (2023) menyatakan belanja daerah ada pengaruh signifikan kepada kinerja keuangan daerah, namun penelitian Dasmal, Basri dan Indrawati (2020) mengatakan belanja daerah tidak ada pengaruh signifikan kepada kinerja pemerintah daerah. Riset Niswani dan Ikhyanuddin (2022) mengatakan secara parsial belanja modal ada pengaruh positif signifikan kepada kinerja keuangan daerah, namun riset Putri dan Yuniarta (2023) menyatakan belanja modal ada pengaruh negatif serta tak signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari fenomena permasalahan diatas dan terdapatnya perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Dana

Perimbangan, Belanja Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Akademis

Diharapkan riset ini bisa bermanfaat untuk bahan referensi penelitian yang dilakukan kedepannya dan menjadi penambah ilmu pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

- b. Peneliti

Diharapkan observasi yang dilakukan peneliti bisa dijadikan sebagai pembelajaran serta bisa menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan riset ini akan membantu untuk berkontribusi saran maupun masukan perihal kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintah serta mengevaluasi pemerintah melalui kinerja capaian finansial pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan riet ini akan mengedukasi masyarakat guna memahami tentang kinerja capaian finansial pemerintah setempat yang diukur dengan skala pemerintah setempat, dana perimbangan, pengeluaran daerah dan pengeluaran modal.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan telaah pustaka sebelumnya yang dijadikan landasan teori utama dalam penelitian ini serta berisikan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

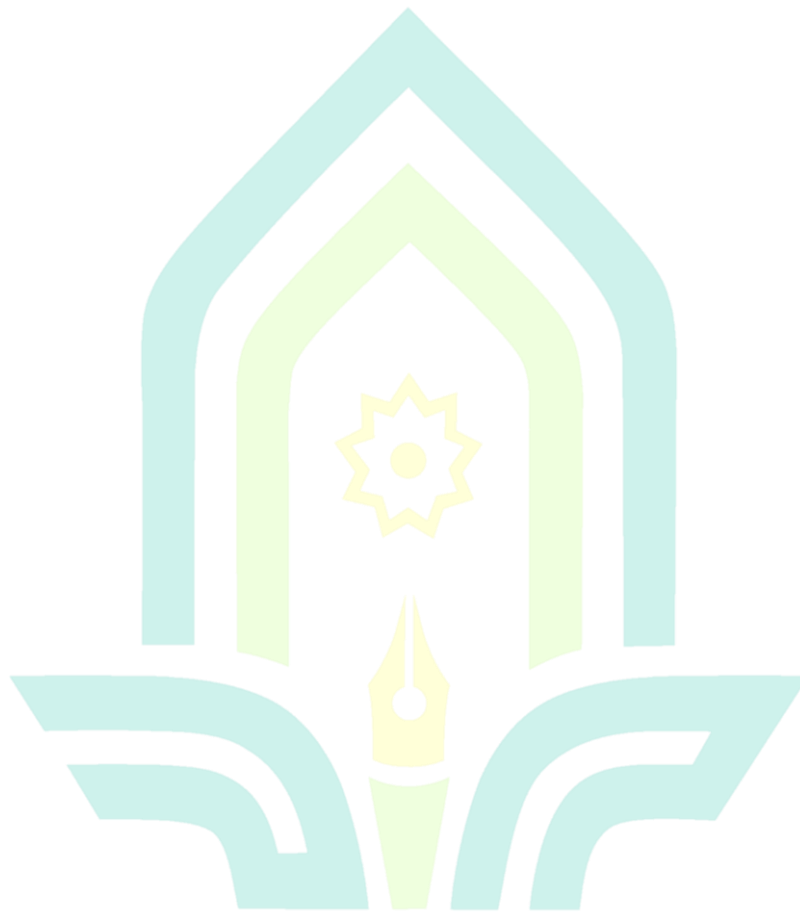
Bab ini juga membahas variabel penelitian yang diidentifikasi, memberikan definisi operasional untuk setiap variabel tersebut, dan teknik analisis data yang digunakan menjelaskan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup pembahasan dan analisis data, dengan gambaran umum penelitian, interpretasi hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup ini melibatkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi teoritis dan praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2021-2022.
2. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2021-2022.
3. Belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2021-2022.
4. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2021-2022.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya agar mendapat hasil yang lebih baik. Keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dari kabupaten/kota di Jawa Timur yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Penelitian ini hanya menggunakan populasi selama 2 tahun dan hanya berfokus pada variabel ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja daerah, dan belanja modal.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sumber informasi mengenai ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebaiknya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana perimbangan dapat terealisasi sesuai target dan juga pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan dana perimbangan agar dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri. Serta pemerintah daerah sebaiknya melakukan penyusunan anggaran secara terukur dan disusun sesuai tujuan yang akan dicapai pemerintah karena belanja daerah yang dilakukan pemerintah berdampak kepada stabilitas keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–14.
- Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018). *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Amanda, C. D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 189–200.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 14(1), 103–116.
- Angraini, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 141–163. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/737>
- Angriani Banunaek, I., A. Manafe, H., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>
- Annisa Alfiani, Diah Armeliza, H. N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(1), 74–87. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi*

Akuntansi, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>

- Ardhana, M. A. (2023). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(1), 84–105. <https://doi.org/10.59583/mars.v3i1.23>
- Arnold, C. (2022). *Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 1–6. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Aziz, A. A. (2024). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Tingkat Kekayaan Daerah , Tingkat Ketergantungan Pada Pusat , Pertumbuhan Ekonomi , dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 4, 6984–6995.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). *Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. 2.
- BPK, H. (2023). *Penyerahan Lhp Atas Lkpd Provinsi Jatim, Anggota V BPK Ungkap Permasalahan Yang Harus Segera Ditindaklanjuti*. [www.Bpk.Go.Id. https://www.bpk.go.id/news/penyerahan-lhp-atas-lkpd-provinsi-jatim-anggota-v-bpk-ungkap-permasalahan-yang-harus-segera-ditindaklanjuti](https://www.bpk.go.id/news/penyerahan-lhp-atas-lkpd-provinsi-jatim-anggota-v-bpk-ungkap-permasalahan-yang-harus-segera-ditindaklanjuti)
- Brigita Oktaviani, S. R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 -2018)*. 7(1), 865–871.
- Damar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2(16), 39–57.
- Dewanti, A. C., Masnila, N., & Sriwijaya, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. *Jurnal Akuntanika* , Vol . 8 , No . 2 , Juli – Desember 2022, 8(2), 111–116.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. (2021). Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan 1 Tahun 2021. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur*, 1–39.

Gusnaini, N., Andesto, R., & Ermawati, . (2020). The Effect of Regional Government Size, Legislative Size, Number of Population, and Intergovernmental Revenue on The Financial Statements Disclosure. *European Journal of Business and Management Research*, 5(6), 1–4.
<https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.6.651>

Haque, K. S., & Rohman, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–10.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x69pkFAAAAJ&cstart=600&pagesize=100&citation_for_view=x69pkFAAAAJ:z62hWG5Wpo0C

Lestari Endri, H. W. D. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 7(2), 1–8.

Maria, E., Halim, A., & Luthfan, M. (2021). Dana Perimbangan Dan Pembangunan Manusia: Sebuah Bukti Pengujian Dari Pulau Kalimantan. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(3), 306.
<https://doi.org/10.30998/jabe.v7i3.8884>

Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>

Mukti, T. (2023). Analisis Keuangan Publik Syariah Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kulon Progo. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 92–105.
<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20271>

Natalia, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(2), 163–176.

Ni Putu Ayu Septiyani Putri, & Gede Adi Yuniarta. (2023). Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133–147. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>

Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>

Novi Natalia, W. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten / Kota*. 9(2), 303–318.

Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>

Purnamasari, D. D. (2022). *Realisasi Belanja Daerah Tahun Ini Lebih Rendah ketimbang Pusat*. [Www.Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/30/realisasi-anggaran-daerah-tahun-ini-lebih-rendah-daripada-pusat](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/30/realisasi-anggaran-daerah-tahun-ini-lebih-rendah-daripada-pusat)

Puspita, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>

Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.388>

Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>

Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.

Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. 2(6).

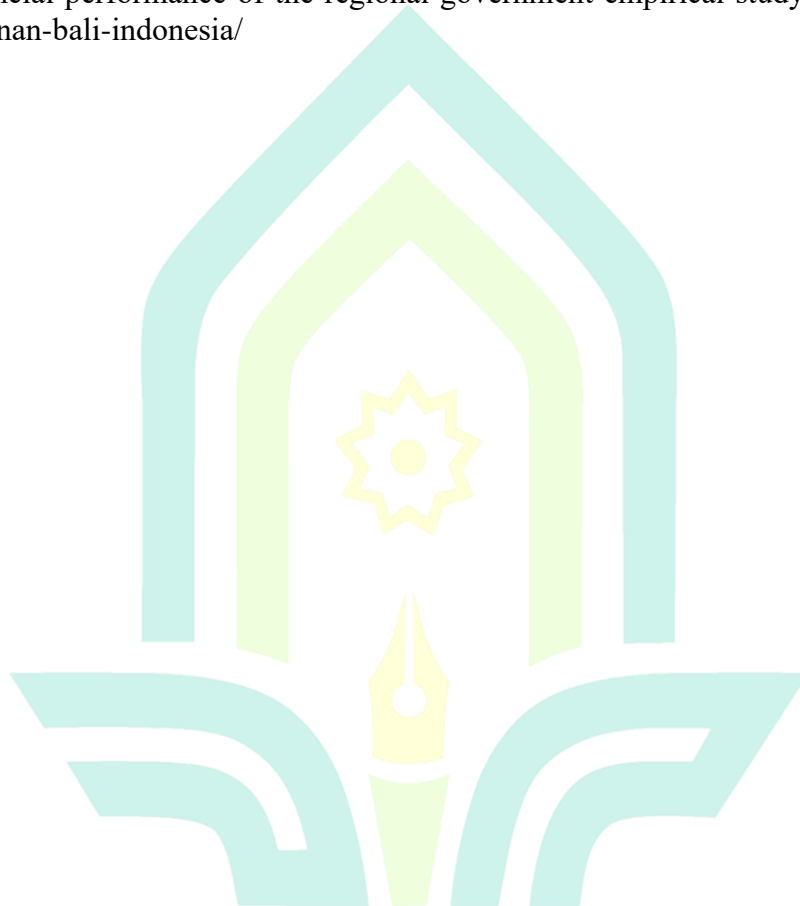
Ramahdani, A. F., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah

Kota Surabaya. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 301–310. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.3924>

- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 14(1), 65–86.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal EK&BI*, 5(2), 401–409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Sriwijayanti, H., & Apriyanti, N. (2020). Analysis of Regional Original Revenue, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue on Local Government Financial Performance. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 5(2), 188–202.
- Syafik. (2022). *Berikut Kabupaten di Jawa Timur dengan Persentase Realisasi APBD Terendah Tahun 2022*. Damarinfo.Com. <https://damarinfo.com/berikut-kabupaten-di-jawa-timur-dengan-persentase-realisisi-apbd-terendah-tahun-2022/>
- Syahidin, S., & Jalil, M, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162>
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113. <https://doi.org/10.24246/persi.v1i1.p91-113>
- Tumija, Doni Hakiki, I. A. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(c), 56–78. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3227>
- Ulum, M. B., & Gisela Syaputri, A. G. (2021). Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Di Sumatera Selatan. *Mbia*, 20(2), 111–122. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>

Wahyudi Ihsan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.

Wijaya, I. K. A. P. W., & Candraningrat, I. R. (2021). Regional Revenue and Balanced funds on the Financial Performance of the Regional Government (Empirical Study at Tabanan, Bali, Indonesia). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 5–309. <https://www.ajhssr.com/regional-revenue-and-balanced-funds-on-the-financial-performance-of-the-regional-government-empirical-study-at-tabanan-bali-indonesia/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Rakha Mita Artanti
2. Tempat tanggal lahir : Pematang, 29 November 2000
3. Alamat rumah : Desa Blimbing, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang
4. Alamat tinggal : Desa Blimbing, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang
5. Nomor handphone : 085228184993
6. Email : rakhamitaartanti29@gmail.com
7. Nama ayah : Ruba'i
8. Pekerjaan ayah : Karyawan swasta
9. Nama ibu : Kunami
10. Pekerjaan ibu : Ibu rumah tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 02 Blimbing
2. SMP N 1 Ampelgading
3. SMA N 1 Bodeh
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 16 Juli 2024



Rakha Mita Artanti